

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Halim & Kusufi (2018) mengemukakan pengertian kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut:

"kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan juga pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Tingkat kemandirian keuangan ini tercermin dari besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan lain yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman."

Menurut Patarai (2017:282), "kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah."

Sedangkan Fahlevi et al. (2022:80), menyatakan bahwa "kemandirian keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai semua aktivitas pembangunan daerah serta perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat."

Dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat di atas bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat melalui sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung pada bantuan dana pusat.

#### **2.1.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian mengindikasikan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana dari luar daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi, dan sebaliknya. Selain itu, rasio kemandirian ini juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Semakin besar rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang sekaligus menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Halim & Kusufi, 2018).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio PAD terhadap dana transfer untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendekatan ini merujuk pada rumus yang dikemukakan oleh Patarai (2017:282), yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio tersebut, menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

#### **2.1.1.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah**

Beberapa pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, khususnya terkait undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Dilliana & Herdi, 2022:26), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pola hubungan instruktif, yaitu pemerintah pusat memiliki dominasi yang lebih besar dibandingkan pemerintah daerah, karena daerah belum memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk melaksanakan otonomi secara mandiri.
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu dimana keterlibatan peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan memdekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemerintah pusat dalam memberikan konsultasi beralih menjadi peran partisipasi.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu pemerintah pusat tidak terlibat, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintahan pusat sepenuhnya mendelegasikan wewenang keuangan kepada pemerintah daerah dengan keyakinan penuh.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, beserta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah, dapat disajikan dalam matriks pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

| <b>Kemampuan Keuangan</b> | <b>Tingkat Kemandirian (%)</b> | <b>Pola Hubungan</b> |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Rendah Sekali             | 0-25                           | Instruktif           |
| Rendah                    | >25-50                         | Konsultif            |
| Sedang                    | >50-75                         | Partisipatif         |
| Tinggi                    | >75-100                        | Delegatif            |

Sumber: Dilliana & Herdi (2022:26)

## **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian PAD**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, "pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2023) menjelaskan pengertian pad sebagai berikut:

"PAD merupakan pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi masing-masing daerah sebagai bentuk desentralisasi."

Sementara itu, Halim & Kusufi (2018) menyatakan "pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi yang dimiliki daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah."

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari potensi ekonomi wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Sumber Perolehan PAD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari beberapa pos pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Namun secara umum, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen yang paling dominan dalam penerimaan PAD.

- 1) Pajak daerah, menurut Mardiasmo (2018), adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak ini dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian
  - a. Pajak provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Lain-lain.
- 2) Retribusi daerah, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan khusus untuk kepentingan individu atau badan hukum (Mardiasmo, 2018).
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini mencakup laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik negara/BUMN, serta perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Halim & Kusufi, 2018).
- 4) Lain-lain PAD yang sah, adalah pendapatan ini yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan di atas (Halim & Kusufi, 2018).

### **2.1.3 Tax Effort**

#### **2.1.3.1 Pengertian Tax Effort**

Sarmiento (2023:66) mengemukakan pengertian dari *tax effort*, sebagai berikut:

*"Tax effort can be defined as being an index of the ratio between the share of actual tax collection in the gross domestic product and taxable capacity with tax capacity being "the predicted tax-to-gross domestic product ratio that can be estimated empirically, taking into account a country's specific macroeconomic, demographic, and institutional features, which all change through time."*

Menurut Furqon et al. (2022:24), "upaya pajak (*tax effort*) adalah rasio penerimaan pajak aktual yang dihasilkan terhadap proyeksi penerimaan yang dianggarkan pada tahun anggaran tertentu."

Sementara itu Teniro et al. (2022:12), menyatakan "upaya pajak (*tax effort*) merupakan adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan retribusi yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah."

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax effort* atau upaya pajak merupakan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan terutama dari pajak dengan mempertimbangkan kemampuan penduduk membayar pajak dan potensi sumber pendapatan asli daerah.

#### **2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Effort**

Menurut Kristiaji et al. (2021:10) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax effort* adalah:

1. Kapasitas ekonomi daerah

Daerah dengan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki *tax effort* yang lebih baik. Hal ini karena tingkat pendapatan yang lebih tinggi menciptakan basis pajak yang lebih luas dan dapat meningkatkan kapasitas pajak.

2. Tingkat konsumsi masyarakat

Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi cenderung mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih besar. Hal ini karena mayoritas pajak daerah tingkat kabupaten/kota berbasis konsumsi seperti halnya pajak hotel pajak restoran pajak hiburan dan lain sebagainya.

### 3. Demografi dan sosial

Semakin besar populasi di suatu daerah maka akan meningkatkan basis pajak dan pada gilirannya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya semakin lama masyarakat di suatu daerah mendapatkan pendidikan formal maka berpotensi untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kewajiban pajak sehingga penerimaan pajak turut meningkat.

### 4. Ketergantungan dana transfer

Daerah yang pendapatan daerahnya banyak berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki kecenderungan akan mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih rendah pada tahun berikutnya.

### 5. Kebijakan fiskal

Daerah dengan tata kelola yang lebih baik cenderung memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi, karena transparansi dan akuntabilitasnya lebih baik.

#### 2.1.3.3 Perhitungan *Tax Effort*

Menurut Dalagamas et al. dalam Kristiaji et al. (2021:7) secara umum terdapat empat pendekatan untuk menentukan *tax effort*, yaitu:

#### 1. *Standard regression*

Indeks *tax effort* diukur sebagai rasio antara penerimaan pajak aktual terhadap potensi penerimaan pajak (*taxable capacity*). Potensi penerimaan pajak, dihasilkan dari nilai yang diprediksi berdasarkan analisis regresi.

## 2. *Stochastic frontier*

Pendekatan ini merupakan perpanjangan dari model regresi standar yang didasari oleh premis bahwa batas kemungkinan produksi penerimaan pajak maksimum dapat dicapai dengan mempertimbangkan serangkaian faktor determinan. Oleh karenanya hasil estimasi antara pendekatan regresi standar dengan analisis *stochastic frontier* akan sangat berkorelasi dan memiliki hubungan substitusi. Perbedaan antara *stochastic frontier* dengan regresi standar hanya terletak pada interpretasi *taxable capacity* yang lebih objektif terlepas dari kendala kelembagaan tertentu.

## 3. *Budget balance*

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang cukup sederhana karena tidak menggunakan regresi atau teknik ekonometrika lainnya. Dalam pendekatan ini, *tax effort* diukur sebagai rasio kinerja perpajakan yang seimbang dengan target belanja pemerintah yang ditetapkan.

## 4. *Welfare maximization*

Indeks *tax effort* dihitung sebagai akumulasi dari rasio penerimaan pajak aktual ditambah dengan rasio target pajak yang telah diprediksi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks rasio antara pajak yang berhasil dipungut terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan kapasitas ekonomi di suatu wilayah atau potensi pajak pada periode yang sama. Pendekatan ini didasarkan pada metode yang dikemukakan oleh Le et al. (2012). Rasio penerimaan pajak aktual terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur *tax effort*, karena data

yang dibutuhkan relatif mudah diperoleh dan indikator ini mampu memberikan gambaran cepat tentang tren perpajakan di berbagai wilayah. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Tax\ Effort = \frac{Penerimaan\ Pajak}{PDRB} \times 100\%$$

Kristiaji et al. (2021) menyatakan bahwa analisis *tax effort* memberikan gambaran tentang kekuatan fiskal suatu daerah, diukur dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, maka posisi fiskal di daerah tersebut dianggap kuat. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 0, maka posisi fiskal di daerah tersebut dapat dianggap lemah. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai *tax effort* suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam memperoleh pendapatan dari sisi pajak daerah, yang menjadi sumber penting untuk mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.

#### **2.1.4 Wealth**

##### **2.1.4.1 Definisi Wealth**

*Wealth* secara umum dapat diartikan kekayaan atau kemakmuran (Sugianto, 2017:35). Menurut Parera (2020:16) kemakmuran adalah kecukupan masyarakat terhadap barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sehingga produksi harus meningkat.

Sementara itu, menurut Nur (2024:80) kemakmuran dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan yang dirasakan manusia relatif lebih banyak dapat dipenuhi karena kebutuhan seimbang dengan alat pemuas kebutuhan yang ada.

Tahir et al. (2017:82) menyatakan pengertian dari kemakmuran sebagai berikut:

"kemakmuran rakyat adalah suatu keadaan dimana segala kebutuhan mulai dari kebutuhan pangan dan sandang milik masyarakat dapat terpenuhi secara merata untuk semua. Sedangkan kemakmuran daerah dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang dan dijalankan oleh organisasi yang disebut pemerintahan dengan ketetapan administratif tertentu memiliki kekayaan budaya, karakter, geografis, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tercukupi bahkan melimpah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemakmuran (*wealth*) adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti sandang dan pangan. Selain itu, kemakmuran juga melibatkan kecukupan sumber daya alam, manusia, budaya, dan potensi wilayah yang dikelola secara optimal untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

#### **2.1.4.2 Perhitungan *Wealth***

Dalam penelitian ini kemakmuran diukur menggunakan PDRB perkapita, yaitu hasil pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran suatu daerah (Tjandra, 2024:167). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), PDRB perkapita mencerminkan rata-rata pendapatan setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat digunakan untuk memproyeksikan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa mendatang. Rumus PDRB per kapita adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{Nilai PDRB atas harga yang berlaku}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Amin et al. (2024:119) menyatakan terdapat korelasi positif antara PDRB perkapita dengan kemakmuran masyarakat, dimana semakin tinggi PDRB perkapita, semakin baik tingkat kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan

secara sederhana; ketika PDRB perkapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat, maka semakin besar pula kemampuan mereka untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.

*World Bank* (2024), membagi tingkat pendapatan daerah ke dalam empat kategori berdasarkan nilai PDRB per kapita. Kategori tersebut meliputi: pendapatan rendah (<\$1.145), pendapatan menengah ke bawah (\$1.146–\$4.515), pendapatan menengah ke atas (\$4.516–\$14.005), dan pendapatan tinggi (>\$14.005). Apabila dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan nilai tukar saat ini sebesar Rp16.216,30 per dolar AS, maka batasan masing-masing kategori menjadi: pendapatan rendah (<Rp18.616.789), pendapatan menengah ke bawah (Rp18.633.050–Rp73.430.534), pendapatan menengah ke atas (Rp73.446.795–Rp227.733.147), dan pendapatan tinggi (>Rp227.733.147) per kapita per tahun. Klasifikasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran ekonomi suatu daerah secara kuantitatif dan dapat digunakan sebagai dasar analisis pembangunan.

## **2.1.5 Belanja Modal**

### **2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, "belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud."

Menurut Jatnika et al. (2024:54), "belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas publik untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap seperti tanah, bangunan, infrastruktur, peralatan atau fasilitas lain yang digunakan untuk jangka waktu yang panjang.

Sedangkan menurut Erlina et al. (2015:155), "belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud."

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran dana yang bertujuan untuk memperoleh atau meningkatkan aset-aset bernilai jangka panjang lebih dari satu periode akuntansi bagi pemerintah pusat maupun daerah.

#### **2.1.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal**

Jenis-jenis belanja modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, meliputi:

##### **1) Belanja modal tanah**

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan setifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Belanja bangunan dan gedung

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain).

Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

#### 6) Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

#### 2.1.5.3 Rasio Belanja Modal

Untuk melihat besarnya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan, dapat dilakukan dengan menghitung rasio belanja modal terhadap total belanja daerah (Oki, 2023:223) yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Jatnika et al. (2024:55), mengemukakan bahwa belanja modal bertujuan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, transportasi umum, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan penting dan memperbaiki kualitas hidup. Selain itu, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya saing suatu daerah dalam menarik

investasi, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, dan memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Untuk rasio belanja modal itu sendiri, belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio yang ideal. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan sebelumnya. Namun, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan sangat penting. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu ada upaya peningkatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerahnya (Oki, 2023:224).

#### **2.1.6 Kajian Empiris Terdahulu**

Beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian, sebagai berikut:

1. Oktavia & Handayani (2021) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh PAD, *Tax effort*, Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah” pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Riza dan Zuripal (2023) dengan judul “Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektivitas PAD dan *Tax Effort* terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi” periode 2018-2022. Dengan hasil penelitian

ketergantungan pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, kemudian efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan *tax effort* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Terakhir, ketergantungan daerah, efektivitas PAD, dan *tax effort* secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Ginting et al. (2024) dalam penelitian yang berjudul “*The effect of local government size, wealth, balancing funds, capital expenditures, employee expenditures and budget financing surplus (SILPA) on regional financial independence*” pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2022. Dengan hasil penelitian ukuran pemerintah daerah, *wealth*, SILPA tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan, belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, kemudian ukuran pemerintah daerah, *wealth*, dana perimbangan, belanja modal, belanja pegawai dan SILPA secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
4. Audina et al. (2024) dalam jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015-2021. Dengan hasil belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan *wealth* berpengaruh terhadap

kemandirian keuangan daerah, selanjutnya belanja modal dan *wealth* bersamaan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

5. Andini et al. (2023) dengan judul “*The effect of Local Own Source Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence*”, studi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, selanjutnya pendapatan asli daerah, *tax effort*, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
6. Saraswati & Nurharjanti (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” studi pada provinsi di Indonesia periode 2017-2019. Hasil penelitian diperoleh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial (individu) variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, variabel retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan secara parsial (individu) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
7. Millenia (2022), penelitian tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan, kemakmuran berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran pemerintah daerah, kemakmuran dan *intergovernmental revenue* secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

8. Imawan & Wahyudin (2014) dengan judul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012”. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, *wealth* secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, karakteristik pemerintah daerah yang berupa ukuran, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
9. Novindriastuti & Purnomowati (2020) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal”, pada 34 pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode 2014-2018. Dengan hasil penelitian belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah,

kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, serta jumlah BUMD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

10. Defitri (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”, studi empiris pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan namun negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, kemudian belanja modal dan belanja pegawai secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
11. Kusmila (2023) dengan judul “Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, PAD dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
12. Ariani & Putri (2016) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

13. Malau & Parapat (2020) meneliti pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2010-2017. Dari penelitian tersebut menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
14. Andriana (2020) meneliti pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah pada 150 kabupaten/kota di Provinsi Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018. Hasil penelitian menunjukkan DAU, DBH, dan belanja modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah, DAK secara signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. Secara simultan DAU, DAK, DBH, dan belanja modal mempengaruhi kemandirian daerah.
15. Rivandi dan Anggraini (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, serta belanja modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
16. Tri et al. (2018) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa” di Kabupaten

Jember periode 2015-2016. Dengan hasil belanja modal dan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa, belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Pemberian ADD dan kemandirian keuangan desa tidak berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa.

17. Abdulfatah & Mulyani (2024) meneliti pengaruh PDRB per kapita, investasi dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2023. Hasil penelitian menunjukkan PDRB per kapita, investasi dan belanja modal berpengaruh secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, investasi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
18. Nindita & Rahayu (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini menunjukan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan

daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

19. Riyadi (2022) dengan judul “Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini yaitu dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
20. Hendawati et al. (2018) dengan judul “*The Effect of Capital Cost and General Allocation Fund to The Regional Financial Independence in Bandung City Government*” di Kota Bandung tahun 2010-2016. Hasil dari penelitian ini belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian daerah.

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                               | Persamaan                                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                    | Hasil<br>Penelitian                                                                                                           | Sumber<br>Publikasi                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021) Pengaruh PAD, <i>Tax effort</i> , Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan | Variabel Independen:<br>- <i>Tax Effort</i><br>- Belanja Modal<br>Variabel Dependen:<br>Kemandirian Keuangan Daerah | Variabel Independen:<br>- Pendapatan Asli Daerah<br>Alat Analisis:<br>Regresi Linear Berganda<br>Tempat Penelitian:<br>Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur | PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.<br><i>Tax effort</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Vol. 10 No. 3, e-ISSN: 2460-0585. |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                       | Persamaan                                                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                             | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber<br>Publikasi                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                 | Indikator <i>tax effort</i>                                                                          | Indikator belanja modal: menggunakan realisasi belanja modal                                                                                                          | kemandirian keuangan daerah.<br><br>Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| 2  | Riza dan Zuripal (2023)<br>Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektivitas PAD dan <i>Tax Effort</i> terhadap Kemandirian Daerah | Variabel Independen:<br>- <i>Tax Effort</i><br><br>Variabel Dependen:<br>Kemandirian Keuangan Daerah | Variabel Independen:<br>- Tingkat Ketergantungan Daerah<br>- Efektivitas PAD<br><br>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda<br><br>Tempat Penelitian: Kota Bukittinggi | Secara simultan ketergantungan daerah, efektivitas PAD dan <i>tax effort</i> berpengaruh terhadap kemandirian daerah.<br><br>Ketergantungan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah.<br><br>Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.<br><br><i>Tax effort</i> memiliki | JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Vol. 6 Hal. 1961-1973, e-ISSN:2579-5635 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persamaan                                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber<br>Publikasi                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pengaruh<br>positif<br>signifikan<br>terhadap<br>kemandirian<br>daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| 3  | Ridho Wahyu<br>Ginting,<br>Ningrum<br>Trija<br>Kesuma,<br>Nurul Mizna<br>Sukma, dan<br>Iskandar<br>Muda (2024)<br><i>The effect of<br/>local<br/>government<br/>size, wealth,<br/>balancing<br/>funds, capital<br/>expenditures,<br/>employee<br/>expenditures<br/>and budget<br/>financing<br/>surplus<br/>(SILPA) on<br/>regional<br/>financial<br/>independen-<br/>Dence</i> | Variabel<br>Independen:<br>- <i>Wealth</i><br>- Belanja<br>Modal<br><br>Variabel<br>Dependen:<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah<br><br>Indikator belanja<br>modal | Variabel Independen:<br>- Ukuran<br>Pemerintah<br>Daerah<br>- Dana<br>Perimbangan<br>- Belanja Pegawai<br>- SILPA<br><br>Tempat Penelitian:<br>Kabupaten/Kota<br>Provinsi Sumatera<br>Utara<br><br>Alat Analisis:<br>Regresi Linear<br>Berganda<br><br>Indikator:<br>- <i>Wealth</i><br>menggunakan<br>PDB atas dasar<br>harga konstan,<br>- kemandirian<br>keuangan daerah<br>menggunakan<br>perbandingan<br>PAD terhadap<br>total pendapatan<br>daerah. | Ukuran<br>pemerintah<br>daerah, <i>wealth</i> ,<br>SILPA tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Dana<br>perimbangan<br>berpengaruh<br>negatif<br>signifikan,<br>belanja modal<br>dan belanja<br>pegawai<br>berpengaruh<br>positif<br>signifikan<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Ukuran<br>pemerintah<br>daerah, <i>wealth</i> ,<br>dana<br>perimbangan,<br>belanja modal,<br>belanja<br>pegawai dan<br>SILPA secara<br>simultan<br>berpengaruh<br>terhadap | <i>Brazillian<br/>Journal of<br/>Develop-<br/>ment</i> Vol.<br>10 No. 1,<br>ISSN:<br>2525-8761 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                                 | Persamaan                                                                                                                                                                                                                             | Perbedaan                                                                                                                       | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                | Sumber<br>Publikasi                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | kemandirian daerah.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| 4  | Nurizka Alya Audina, Bob Mustafa, dan Agus Widodo (2024) Pengaruh Belanja Modal dan Wealth (Kemakmuran) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah                                   | Variabel Independen:<br>- Belanja Modal<br>- <i>Wealth</i><br><br>Variabel Dependen:<br>Kemandirian Keuangan Daerah<br><br>Alat analisis:<br>Regresi Data Panel<br><br>Indikator:<br>- <i>Wealth</i><br>- Kemandirian keuangan daerah | Tempat penelitian: Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat<br><br>Indikator belanja modal: menggunakan realisasi belanja modal | Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br><i>Wealth</i> berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br>Belanja modal dan <i>wealth</i> bersamaan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.    | <i>Journal of Accounting Knowledge</i> , Politeknik Negeri Pontianak, Vol. 1 No. 1, e-ISSN: 2721-8953 |
| 5  | Andini, Hani, Yogi, Agustine, Dadang (2023) <i>The effect of Local Own Source Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence</i> | Variabel Independen:<br>- <i>Tax Effort</i><br>- Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen:<br>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat                                          | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah<br><br>Tahun penelitian: 2019-2021<br><br>Alat analisis: Regresi Linear Berganda    | Pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.<br><br><i>Tax effort</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.<br><br>Pendapatan asli daerah, <i>tax effort</i> , dan | <i>Finance and Business Management Journal</i> , Vol. 1 No. 1, 2023<br>ISSN: 3025-1095                |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                                  | Persamaan                                                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber<br>Publikasi                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| 6  | Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021)<br>Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah<br><br>Indikator belanja modal | Variabel Independen:<br>- Pajak Daerah<br>- Retribusi Daerah<br>- Dana Perimbangan<br><br>Alat analisis: Regresi Linear Berganda<br><br>Tempat penelitian: Pemerintah daerah provinsi di Indonesia<br><br>Indikator kemandirian keuangan daerah menggunakan perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah | Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br>Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br>Retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian | <i>Business Management Economic, and Accounting National Seminar</i> , Vol. 2 Hal. 51-64.<br>ISSN: 2746-7910 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                                                           | Persamaan                                                                                                                                       | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber<br>Publikasi                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Nur Aafiah<br>Millenia<br>(2022)<br>Pengaruh<br>Ukuran<br>Pemerintah<br>Daerah,<br>Kemakmuran<br>dan<br><i>Intergovernm<br/>ental Revenue</i><br>terhadap<br>Kinerja<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah | Variabel<br>Independen:<br>Kemakmuran<br>( <i>Wealth</i> )<br><br>Indikator kinerja<br>keuangan<br>menggunakan<br>rasio kemandirian<br>keuangan | Variabel Independen:<br>- Ukuran<br>Pemerintah<br>Daerah<br>- <i>Intergovernment<br/>al Revenue</i><br><br>Tempat penelitian:<br>Kabupaten/Kota di<br>Sumatera Selatan<br><br>Alat analisis: Regresi<br>Linear Berganda<br><br>Indikator <i>Wealth</i> :<br>menggunakan<br>perbandingan PAD<br>terhadap total<br>pendapatan | keuangan<br>daerah.<br><br>Ukuran<br>pemerintah<br>daerah tidak<br>berpengaruh<br>signifikan<br>secara parsial<br>terhadap<br>kinerja<br>keuangan.<br><br>Kemakmuran<br>berpengaruh<br>positif<br>signifikan<br>secara parsial<br>terhadap<br>kinerja<br>keuangan<br>pemerintah<br>daerah.<br><br><i>Intergovernme<br/>ntal Revenue</i><br>tidak<br>berpengaruh<br>signifikan<br>secara parsial<br>terhadap<br>kinerja<br>keuangan<br>pemerintah<br>daerah.<br><br>Ukuran<br>pemerintah<br>daerah,<br>kemakmuran<br>dan<br><i>Intergovernme<br/>ntal Revenue</i><br>secara simultan<br>berpengaruh<br>positif | Jurnal<br><i>Syntax<br/>Admiration</i><br>, Vol. 3<br>Hal. 786-<br>803, e-<br>ISSN:<br>2722-5356 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                     | Persamaan                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber<br>Publikasi                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | signifikan<br>terhadap<br>kinerja<br>keuangan<br>pemerintah<br>daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 8  | Riswanda<br>Imawan dan<br>Agus<br>Wahyudin<br>(2014)<br>Analisis<br>Kemandirian<br>Keuangan<br>Daerah<br>Provinsi Jawa<br>Tengah<br>Tahun<br>Anggaran<br>2010-2012 | Variabel<br>Independen:<br>- <i>Wealth</i><br>- Belanja<br>Modal<br>Variabel<br>Dependen:<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah | Variabel Independen:<br>- Ukuran<br>- <i>Leverage</i><br><br>Alat analisis:<br>Regresi Linear<br>Berganda<br><br>Indikator:<br>- <i>Wealth</i><br>menggunakan<br>PDRB atas harga<br>konstan.<br>- Belanja modal<br>menggunakan<br>realisasi belanja<br>modal.<br>- Kemandirian<br>keuangan daerah<br>perbandingan<br>PAD terhadap<br>total pendapatan<br>daerah. | Ukuran secara<br>parsial<br>berpengaruh<br>positif<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br><i>Wealth</i> secara<br>parsial<br>berpengaruh<br>positif<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br><i>Leverage</i><br>secara parsial<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Karakteristik<br>pemerintah<br>daerah yang<br>berupa ukuran,<br><i>wealth</i> ,<br><i>leverage</i> , dan<br>belanja modal<br>secara simultan<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>kemandirian | <i>Accounting<br/>Analysis<br/>Journal</i> ,<br>Universitas<br>Negeri<br>Semarang,<br>Vol. 3 Hal.<br>147-155,<br>ISSN:<br>2252-6765 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                                        | Persamaan                                                                                                                                                                                | Perbedaan                                                                                                                                                                                               | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                          | Sumber<br>Publikasi                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | keuangan daerah.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| 9  | Inez Novindriastuti dan Nasyiah Hasanah Purnomowati (2020)<br>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal | Variabel Independen:<br>- Belanja Modal<br>- Kemakmuran<br><br>Variabel Dependen:<br>Kemandirian Keuangan Daerah<br><br>Alat analisis: Regresi Data Panel<br><br>Indikator belanja modal | Variabel Independen: Jumlah BUMD<br><br>Tempat penelitian: Pemerintah daerah provinsi di Indonesia.<br><br>Indikator kemandirian keuangan daerah menggunakan perbandingan PAD terhadap total pendapatan | Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br>Kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br>Jumlah BUMD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. | Jurnal Mutiara Madani, Universitas Negeri Sebelas Maret, Vol. 8 Hal. 70-91.<br>e-ISSN: 2477-2119 |
| 10 | Siska Yulia Defitri (2020)<br>Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah                                                                 | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah<br><br>Indikator:<br>- Belanja Modal<br>- Tingkat kemandirian keuangan daerah           | Variabel Independen: Belanja Pegawai<br><br>Alat analisis: Regresi Linear Berganda<br><br>Tempat penelitian: Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat                                     | Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br>Belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.                                      | Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, Vol. 19 No. 2, ISSN: 2623-2480           |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                                   | Persamaan                                                                                                          | Perbedaan                                                                                                                     | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber<br>Publikasi                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                               | Secara<br>simultan<br>belanja modal<br>dan belanja<br>pegawai tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| 11 | Zesmi<br>Kusmila<br>(2023)<br>Pengaruh<br>PAD dan<br>Belanja<br>Modal<br>terhadap<br>Tingkat<br>Kemandirian<br>Keuangan<br>Daerah<br>Kabupaten<br>Kerinci<br>Tahun 2014-<br>2020 | Variabel<br>Independen:<br>Belanja Modal<br><br>Variabel<br>Dependen:<br>Tingkat<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah | Variabel Independen:<br>- PAD<br><br>Tempat penelitian:<br>Kabupaten Kerinci<br><br>Alat analisis: Regresi<br>Linear Berganda | Secara parsial,<br>PAD tidak<br>berpengaruh<br>secara<br>signifikan<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Secara parsial,<br>belanja modal<br>berpengaruh<br>secara tidak<br>signifikan<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Secara<br>simultan, PAD<br>dan belanja<br>modal tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah | Jurnal<br>Pendidikan<br>Tambusai,<br>Vol. 7 No.<br>2 Hal.<br>9226-9234<br>e-ISSN:<br>2614-3097 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                                                                      | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                    | Sumber<br>Publikasi                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2016)<br>Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | Variabel Independen: - Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah                                                                                     | Variabel Independen: - Dana Alokasi Umum<br><br>Tempat penelitian: Jawa Tengah<br><br>Alat analisis: Regresi Linear Berganda<br><br>Indikator:<br>- kemandirian keuangan daerah menggunakan perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah<br>- belanja modal menggunakan realisasi belanja modal | Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.<br><br>Dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. | Seminar Nasional dan <i>the 3<sup>rd</sup> call for Syariah paper</i> ,<br>ISSN: 2460-0784 |
| 13 | Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septiana Parapat (2020)<br>Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah                      | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah<br><br>Indikator kemandirian keuangan daerah<br><br>Alat analisis: Regresi Data Panel | Variabel Independen: PAD<br><br>Tempat penelitian: kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara                                                                                                                                                                                                         | PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.<br><br>Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.                                           | Jurnal EK&BI, Vol. 3 No. 2, ISSN: 2620-7443                                                |
| 14 | Nina Andriana (2020)<br>Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal                                                                               | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kemandirian Daerah                                                                                                | Variabel Independen: - Dana Alokasi Umum<br>- Dana Bagi Hasil<br>- Dana Alokasi Khusus                                                                                                                                                                                                               | DAU, DBH, dan belanja modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah.                                                                                                          | Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN,                         |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                            | Persamaan                                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                   | Sumber<br>Publikasi                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | terhadap<br>Kemandirian<br>Daerah                                                                                                                                         |                                                                                                         | Alat analisis: Regresi<br>Linear Berganda<br><br>Tempat penelitian:<br>150 kabupaten/kota<br>di Indonesia<br><br>Indikator:<br>- Kemandirian<br>daerah<br>menggunakan<br>pendapatan asli<br>daerah.<br>- Belanja modal<br>menggunakan<br>realisasi belanja<br>modal                                                                                                                   | DAK secara<br>signifikan<br>mempengaruhi<br>kemandirian<br>daerah.<br><br>Secara<br>simultan DAU,<br>DAK, DBH,<br>dan belanja<br>modal<br>mempengaruhi<br>kemandirian<br>daerah.                                                      | Vol. 2 No.<br>1, Hal. 105-<br>113<br>e-ISSN:<br>2715-2553                 |
| 15 | Muhammad<br>Rivandi dan<br>Yeyen<br>Anggraini<br>(2022)<br>Pengaruh<br>Pendapatan<br>Asli Daerah<br>dan Belanja<br>Modal<br>terhadap<br>Kemandirian<br>Keuangan<br>Daerah | Variabel<br>Independen:<br>Belanja Modal<br><br>Variabel<br>Dependen:<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah | Variabel Independen:<br>Pendapatan asli<br>daerah<br><br>Indikator:<br>- kemandirian<br>keuangan daerah<br>menggunakan<br>perbandingan<br>PAD terhadap<br>total pendapatan<br>daerah<br>- Belanja modal<br>menggunakan<br>total belanja<br>modal<br><br>Alat analisis:<br>Regresi Linear<br>Berganda<br><br>Tempat<br>penelitian:<br>kabupaten/ kota<br>di Provinsi<br>Sumatera Barat | Pendapatan<br>asli daerah<br>berpengaruh<br>signifikan<br>positif<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Belanja modal<br>berpengaruh<br>signifikan dan<br>negatif<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah | Jurnal<br>Inovasi<br>Penelitian,<br>Vol. 3 No.<br>6<br>ISSN:<br>2722-9467 |
| 16 | Dinna Tri,<br>Hari Sukarno,                                                                                                                                               | Variabel<br>Independen:                                                                                 | Variabel Independen:<br>Alokasi Dana Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belanja modal<br>dan alokasi                                                                                                                                                                                                          | Jurnal<br>Bisnis dan                                                      |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                               | Persamaan                                                                                                                                                                                                        | Perbedaan                                                                     | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber<br>Publikasi                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dan Siti Maria<br>(2018)<br>Pengaruh<br>Belanja<br>Modal dan<br>Alokasi Dana<br>Desa terhadap<br>Kemandirian<br>dan Kinerja<br>Keuangan<br>Desa di<br>Kabupaten<br>Jember    | Belanja Modal<br><br>Variabel<br>Dependen:<br>Kemandirian<br>Keuangan Desa                                                                                                                                       | Tempat penelitian<br>Kabupaten Jember<br><br>Alat analisis: Analisis<br>Jalur | dana desa tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan desa.<br><br>Belanja modal<br>memiliki<br>pengaruh<br>negatif<br>terhadap<br>kinerja<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Pemberian<br>ADD dan<br>kemandirian<br>keuangan desa<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>efektifitas<br>kinerja<br>keuangan desa. | Manajemen<br>Vol. 12 No.<br>1 Hal 37-<br>50,<br>ISSN:<br>2623-0879                                          |
| 17 | Totoh<br>Abdulfatah<br>dan Sri<br>Mulyani<br>(2024)<br>Pengaruh<br>PDRB per<br>kapita,<br>Investasi dan<br>Belanja<br>Modal<br>terhadap<br>Kemandirian<br>Keuangan<br>Daerah | Variabel<br>Independen:<br>- PDRB per<br>kapita<br>- Belanja<br>Modal<br><br>Variabel<br>Dependen:<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah<br><br>Tempat<br>penelitian:<br>kabupaten/kota di<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Variabel Independen:<br>Investas<br><br>Tahun Penelitian:<br>2020-2023        | Adanya<br>hubungan<br>positif yang<br>signifikan<br>antara PDRB<br>per kapita dan<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Investasi tidak<br>memiliki<br>pengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.                                                                                        | Jurnal<br>Akuntansi<br>Keuangan<br>dan Bisnis,<br>Vol. 2 No.<br>2, Hal. 694-<br>701<br>e-ISSN:<br>2987-9078 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                 | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                             | Perbedaan                                                                    | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                            | Sumber<br>Publikasi                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                | Alat analisis:<br>Regresi Data<br>Panel                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | Belanja modal memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah<br><br>PDRB per kapita, investasi belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.                  |                                                                                               |
| 18 | Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018)<br>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | Variabel Independen:<br>Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen:<br>Kemandirian Keuangan Daerah<br><br>Tempat penelitian:<br>kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat<br><br>Alat analisis:<br>Regresi Data<br>Panel<br><br>Indikator:<br>- belanja modal | Variabel Independen:<br>- PAD<br>- DAU<br><br>Tahun penelitian:<br>2014-2017 | Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan.<br><br>Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. | <i>Journal Accounting and Finance</i> , Universitas Telkom, Vol. 2 No. 1<br>e-ISSN: 2581-1088 |

| No | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                      | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                             | Perbedaan                                                                                                                        | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber<br>Publikasi                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     | - kemandirian<br>keuangan<br>daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | Dana alokasi<br>umum tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Belanja modal<br>berpengaruh<br>negatif<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.                                                                                                      |                                                                                          |
| 19 | Wulan Riyadi<br>(2022)<br>Pengaruh<br>DAU, DAK,<br>dan Belanja<br>Modal<br>terhadap<br>Tingkat<br>Kemandirian<br>Keuangan<br>Daerah | Variabel<br>Independen:<br>Belanja Modal<br><br>Variabel<br>Dependen:<br>Tingkat<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah<br>Tempat<br>penelitian:<br>kabupaten/kota di<br>Provinsi Jawa<br>Barat<br><br>Indikator tingkat<br>kemandirian<br>keuangan daerah | Variabel Independen:<br>- DAU<br>- DAK<br><br>Tahun penelitian:<br>2017-2019<br><br>Alat analisis:<br>Regresi Linear<br>Berganda | DAU tidak<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>DAK<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah.<br><br>Belanja modal<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>keuangan<br>daerah. | Jurnal<br>Akuntansi<br>dan Sistem<br>Informasi,<br>Vol. 3 No.<br>1<br>ISSN:<br>2745-5343 |

| No                                                                                                                                                                                                 | Penelitian,<br>Tahun,<br>Judul                                                                                                                                                                                                          | Persamaan                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                         | Sumber<br>Publikasi                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                                                                                                                                                                                 | Hendra<br>Hendawati,<br>Dekrita<br>Komarasakti<br>dan Surya<br>Ansori (2018)<br><i>The Effect of<br/>Capital Cost<br/>Allocation<br/>Fund To The<br/>Regional<br/>Financial<br/>Independence<br/>in Bandung<br/>City<br/>Government</i> | Variabel<br>Independen:<br>Belanja modal<br>Variabel<br>Dependen:<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah | Variabel Independen:<br>Dana Alokasi Umum<br>Alat analisis: Regresi<br>Linear Berganda<br>Tempat penelitian:<br>pemerintah daerah<br>Kota Bandung<br>Indikator:<br>- Kemandirian<br>keuangan daerah<br>menggunakan<br>perbandingan<br>PAD terhadap<br>total pendapatan<br>daerah<br>- Belanja modal<br>menggunakan<br>total belanja<br>modal | Belanja modal<br>berpengaruh<br>positif<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>daerah<br>Dana alokasi<br>umum<br>berpengaruh<br>negative<br>terhadap<br>tingkat<br>kemandirian<br>daerah. | <i>The<br/>Internation<br/>al Journal<br/>of Business<br/>Review<br/>(The Jobs<br/>Review), 1<br/>(2), 141-<br/>149<br/>ISSN:<br/>2621-7317</i> |
| Resta Marlina (2024)<br>Pengaruh <i>Tax Effort, Wealth</i> , dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah<br>(Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2023) |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berhak menggali sumber pendapatan sendiri serta mengalokasikan anggaran secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi

daerah adalah menghadirkan kemandirian keuangan daerah (Alhusain et al., 2018:1)

Menurut Dilliana & Herdi (2022:6) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui indikator rasio PAD terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Patarai, 2017:282). Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan belanjanya tanpa bergantung pada bantuan keuangan dari pusat.

Teori yang relevan dalam konsep kemandirian keuangan daerah adalah teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & David (1991), teori ini menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau *principal* (Sudaryo et al., 2021:56). Dalam penelitian ini, pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* atau pengelola sumber daya, memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, yang berperan sebagai *principal* atau pemilik sumber daya. Pemerintah diharapkan mampu mengelola sumber pendapatan secara efektif untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam

membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Alhusain et al., 2018:2). Hal tersebut dikarenakan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, yaitu dana perimbangan (Hidayat, 2017:83). Komponen PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keseluruhan komponen tersebut, penyumbang porsi pendapatan yang paling signifikan adalah dari sektor pajak dan retribusi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sisi pajak adalah *tax effort* (Harefa et al., 2018:25). Menurut Tjandra (2024:159) upaya pajak (*tax effort*) adalah tingkat sampai dimana daerah dapat memanfaatkan basis pajak yang dimilikinya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang menggambarkan jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut (Le et al., 2012). Penerimaan pajak yang optimal mencerminkan peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai urusan daerah, seperti pembangunan, pelayanan publik, atau kegiatan pemerintah daerah lainnya. Sehingga, semakin tinggi *tax effort*, semakin besar pula kontribusinya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Tjandra, 2024:171).

Penelitian Riza & Zuripal (2023) yang mendukung pernyataan ini, menunjukkan bahwa *tax effort* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Oktavia & Handayani (2021),

dan Andini et al. (2023) menunjukkan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam kaitannya dengan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* bertugas mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara yang bertanggung jawab, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam memanfaatkan sumber daya fiskal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, *wealth* atau kemakmuran juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Parera (2020:16) *wealth* atau kemakmuran adalah kecukupan masyarakat terhadap barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sehingga produksi harus meningkat. Dalam penelitian ini, *wealth* direpresentasikan dengan PDRB perkapita, yang mencerminkan rata-rata pendapatan setiap orang pada tahun tersebut (BPS, 2023). Peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat, dapat mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan perkapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan daerah akan terus meningkat (Patarai, 2017:120). Dengan demikian, pendapatan per kapita akan berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Abdulfatah & Mulyani (2024) yang menemukan hubungan positif antara PDRB per kapita dengan kemandirian keuangan daerah. Penelitian Audina et al. (2024) menunjukkan bahwa *wealth* berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Millenia (2022) serta Imawan &

Wahyudin (2014) menunjukkan *wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Sebaliknya, penelitian Noviandriastuti & Purnomowanti (2020) menunjukkan bahwa kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian Ginting et al. (2024) menunjukkan bahwa *wealth* tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam teori *stewardship*, *wealth* atau kemakmuran suatu daerah mencerminkan hasil dari pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab mengelola potensi ekonomi daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah berhasil meningkatkan *wealth* melalui pengelolaan yang efektif, hal ini menunjukkan keberhasilan mereka dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan menciptakan manfaat yang merata.

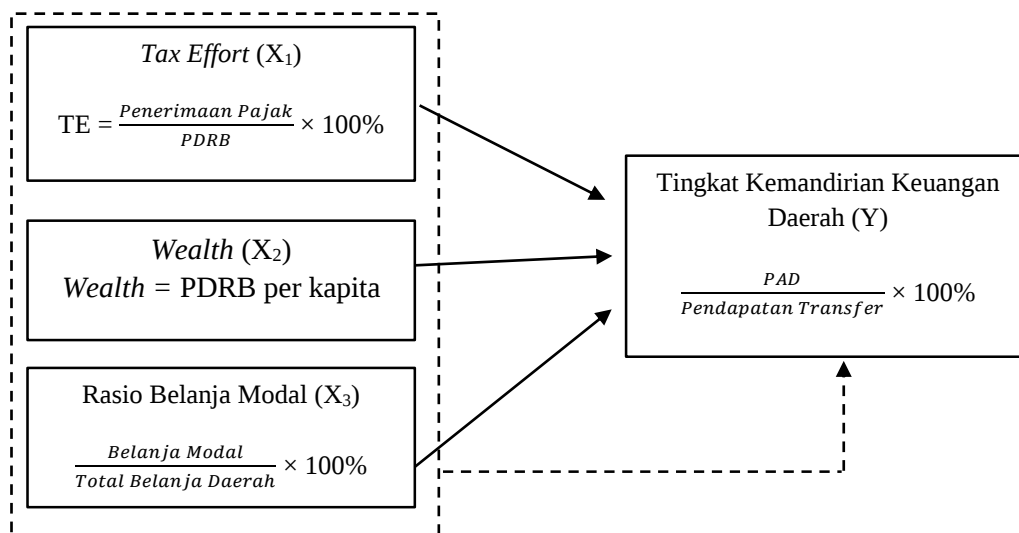
Disamping itu kemandirian keuangan daerah juga dipengaruhi oleh seberapa besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101 Tahun 2011, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal diukur menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Belanja modal diwujudkan dalam pembangunan daerah dan perbaikan daerah di berbagai sektor. Menurut Mardiasmo dalam Yuliani (2019:3) semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik

terhadap pembangunan yang tercermin dan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu faktor utama dari kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Ginting et al. (2024), Ariani & Putri (2016), dan Hendrawati et al. (2018) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Andini et al. (2023), dan Riyadi (2022) menunjukkan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian Oktavia & Handayani (2021), Defitri (2020), Malau & Parapat (2020), Rivandi & Anggraini (2021), Abdulfatah & Mulyani (2024), dan Nindita & Rahayu (2018) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dalam penelitian Audina et al. (2024), Saraswati & Nurharjanti (2021), Noviandriastuti & Purnomowanti (2020), Kusmila (2023), Andriana (2020), dan Yulihantini et al. (2018), menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal jika dikaitkan dengan teori *stewardship*, merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang dipercayakan dengan efisien dan efektif. Melalui belanja modal, pemerintah melakukan investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan aset daerah, yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan belanja modal yang efektif menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan manfaat berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- = Secara Parsial  
 - - - - -→ = Secara Simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. *Tax Effort* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. *Wealth* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

4. *Tax Effort*, *Wealth*, dan Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.